



SNAP TO READ

PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PENUTUR ASING (BIPA) DI PTKIN SE-JAWA DAN MADURA

Muyassaroh, Aldila Rahmita Putri, Dita Karisma Fahriani

*UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Universitas Negeri Malang,
Universitas Negeri Malang*

*nachrowi.muyas@gmail.com, aldilarahmita202@gmail.com,
dkarisma21@gmail.com*

First received: May 24, 2025

Final proof received: June 29, 2025

Abstract:

The Indonesian Language Program for Foreign Speakers (BIPA) plays a strategic role in strengthening cultural diplomacy and promoting the internationalization of the Indonesian language. However, the implementation of BIPA programs at State Islamic Religious Higher Education Institutions (PTKIN) across Java and Madura still faces various challenges, such as the absence of specific institutional policies, the lack of a standardized curriculum, limited supporting facilities, and teaching materials that do not meet the needs of foreign learners. This study aims to describe the problems of policy and program implementation at six PTKIN: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Kediri, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, IAIN Madura, and UIN Raden Mas Said Surakarta. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using Miles, Huberman, and Saldana's interactive model. The findings indicate that BIPA program implementation remains suboptimal. Therefore, policy intervention, institutional strengthening, and the development of an integrative and needs-based BIPA learning model are urgently needed.

Keywords:

BIPA, institutional policy, curriculum, teaching materials

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) merupakan salah satu instrumen strategis dalam diplomasi budaya dan internasionalisasi bahasa Indonesia. Melalui program ini, bahasa Indonesia tidak hanya diperkenalkan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas nasional yang dapat membangun hubungan antarbangsa. Kebutuhan terhadap pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya minat masyarakat dunia terhadap budaya Indonesia, kerja sama ekonomi, dan pendidikan tinggi di Indonesia (Jazeri dan Maulida, 2018). Program BIPA telah berkembang sejak awal 1990-an dan kini telah mencakup lebih dari 500 lembaga di 54 negara sekaligus menandakan bahwa bahasa Indonesia mulai diperhitungkan sebagai bahasa penting di tingkat global (Wahyuni, 2023).

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus memperluas jangkauan program BIPA, termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Salah satu lembaga pendidikan tinggi yang berperan dalam penyelenggaraan BIPA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Keberadaan mahasiswa asing di lingkungan PTKIN menjadi salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan program BIPA. Mahasiswa asing yang berasal dari negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Mesir, Maroko, dan beberapa negara Afrika serta Asia Selatan menempuh studi keagamaan dan umum di PTKIN, sehingga membutuhkan akses terhadap pembelajaran bahasa Indonesia secara intensif.

Muyassaroh, et al. (2024) menyebutkan bahwa sejumlah PTKIN seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Raden Mas Said Surakarta, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Madura, UIN Syekh Wasil Kediri, dan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

telah menjadi tujuan utama mahasiswa asing. Dalam konteks ini, program BIPA tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bahasa, tetapi juga wahana pembentukan pemahaman lintas budaya yang dapat mempererat relasi Indonesia dengan komunitas internasional. Keberadaan program BIPA di PTKIN juga menjadi bagian dari strategi internasionalisasi pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Namun demikian, pelaksanaan program BIPA di lingkungan PTKIN, khususnya di wilayah Jawa dan Madura, menghadapi sejumlah tantangan serius. Beberapa di antaranya berkaitan dengan ketiadaan kebijakan institusional yang spesifik, belum tersedianya kurikulum baku, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta kurangnya bahan ajar yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan pembelajar asing. Purnamasari (2021) mengidentifikasi tiga permasalahan utama dalam pembelajaran BIPA, yaitu: (1) rendahnya pemahaman pemelajar terhadap budaya Indonesia yang memengaruhi pemaknaan bahasa; (2) minimnya kesempatan praktik bahasa secara nyata dalam kehidupan sehari-hari; dan (3) kendala psikologis seperti rasa malu dan takut salah yang menghambat keberanian berbahasa. Meskipun penelitian tersebut memberikan gambaran yang penting, konteks PTKIN belum dibahas secara khusus.

Lebih lanjut, Rochmawati dan Muslim (2019) menjelaskan pelaksanaan program BIPA di banyak PTKIN masih bersifat insidental karena belum tertuang dalam dokumen kelembagaan yang eksplisit. Hal ini menyebabkan tidak adanya dasar hukum dan kebijakan yang kuat dalam penyelenggaraan program. Sementara itu, Nursalim (2020) menekankan bahwa keterbatasan fasilitas, seperti laboratorium bahasa, media pembelajaran, dan tenaga pengajar yang kompeten menjadi penghambat utama efektivitas pelaksanaan BIPA di lingkungan PTKIN. Isnaniah (2020) juga menggarisbawahi bahwa meskipun secara kurikulum program BIPA sudah mulai diintegrasikan, tetapi pelaksanaannya masih terbatas hanya di beberapa kampus seperti UIN Jakarta dan UIN Surakarta.

Kondisi serupa juga terlihat di UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Tulungagung. Kampus ini memiliki jumlah mahasiswa asing yang relatif banyak serta calon pengajar BIPA yang cukup potensial. Program BIPA di kampus ini telah dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai mata kuliah peminatan dengan total 10 SKS, meliputi mata kuliah seperti Pemahaman Lintas Budaya, Komunikasi Lintas Budaya, Perencanaan Pembelajaran BIPA, Pengembangan Media Pembelajaran, dan Pengembangan Bahan Ajar. Namun, belum adanya kebijakan institusional yang mengatur secara spesifik penyelenggaraan program BIPA menyebabkan implementasi program ini belum maksimal. Integrasi program BIPA dengan program studi Tadris Bahasa Indonesia juga belum sepenuhnya terstruktur dan terkoordinasi dengan baik oleh pimpinan lembaga.

Tabel 1. Sajian Mata Kuliah BIPA UIN Tulungagung

No	Kode	Mata Kuliah Pilihan BIPA	SKS	Kompetensi	Prasyarat
1	62J34	Pemahaman Lintas Budaya*	2	Utama/P	-
2	62J35	Komunikasi Lintas Budaya*	2	Utama/P	-
3	62J36	Perencanaan Pembelajaran BIPA*	2	Utama/P	-
4	62J37	Pengembangan Media Pembelajaran BIPA*	2	Utama/P	-
5	62J38	Pengembangan Bahan Ajar BIPA*	2	Utama/P	-

Padahal, wilayah Jawa dan Madura merupakan kawasan strategis yang menjadi pusat pendidikan tinggi Islam sekaligus wilayah dengan jumlah mahasiswa asing yang cukup signifikan. Sayangnya, kajian mengenai problematika pembelajaran BIPA secara khusus di wilayah ini masih sangat terbatas. Mayoritas penelitian yang ada lebih berfokus pada tataran umum pembelajaran BIPA di Indonesia tanpa mempertimbangkan karakteristik kelembagaan, geografis, dan budaya lokal dari PTKIN yang bersangkutan. Hal ini menjadi hambatan dalam pengambilan kebijakan berbasis data dan dalam pengembangan model pembelajaran yang sesuai konteks.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna

memetakan problematika yang dihadapi oleh PTKIN se-Jawa dan Madura dalam menyelenggarakan program BIPA. Pemahaman yang mendalam terhadap tantangan yang ada diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan dalam perumusan kebijakan institusional, pengembangan kurikulum standar, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta penyusunan bahan ajar yang kontekstual dan berbasis kebutuhan pembelajar asing (Anas, 2022). Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat posisi BIPA sebagai bagian dari strategi internasionalisasi pendidikan tinggi keagamaan Islam, sekaligus memperluas pengaruh budaya Indonesia di tingkat global. Selain itu, penelitian ini juga menjadi referensi penting bagi pengambil kebijakan dalam memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pengajar, serta menyusun bahan ajar yang relevan bagi pembelajar asing (Yusuf dan Arifin, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam dinamika sosial dan institusional yang memengaruhi penyelenggaraan program BIPA di lingkungan PTKIN. Menurut Yin (2018) studi kasus digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak jelas. Dalam konteks ini, studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi hubungan kompleks antara kebijakan institusional, pelaksanaan program, dan keterlibatan sumber daya manusia dalam program BIPA.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif problematika penyelenggaraan program BIPA di PTKIN se-Jawa dan Madura. Fokus datanya mencakup: (1) kebijakan institusional yang mengatur dan mendukung program BIPA; (2) pelaksanaan pembelajaran dalam program BIPA; dan (3) keterlibatan sumber daya manusia dalam mendukung keberlangsungan program. Lokasi penelitian mencakup enam PTKIN yang tersebar di wilayah Jawa dan Madura, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, UIN Raden Mas Said, UIN Syekh Wasil Kediri, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan UIN Madura.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data empiris terkait proses pembelajaran, penggunaan fasilitas, dan interaksi kelas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan kunci, yakni pengelola program BIPA, dosen pengajar, mahasiswa asing, serta pejabat struktural kampus. Dokumentasi dilakukan terhadap dokumen kebijakan, kurikulum, pedoman teknis, dan laporan kegiatan program. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode sebagaimana dianjurkan oleh Patton (2015) guna memperkuat kredibilitas temuan penelitian.

Data dianalisis dengan pendekatan analisis interaktif model (Miles, Huberman, dan Saldana, 2018) yang mencakup empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengumpulan data merupakan tahap awal memperoleh informasi melalui instrumen penelitian. Tahap reduksi data melibatkan penyaringan dan klasifikasi data berdasarkan kategori tematik. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan untuk menampilkan hubungan antarkomponen secara visual. Verifikasi dan penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses analisis melalui teknik triangulasi, guna memastikan keabsahan dan konsistensi data. Model ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang utuh dan reflektif terhadap permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Kebijakan Institusional

Sebagian besar PTKIN di wilayah Jawa dan Madura telah memulai langkah awal dalam mengakomodasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Namun, keberadaan program tersebut belum didukung oleh kebijakan kelembagaan yang mapan. Dalam konteks kebijakan pendidikan

tinggi, Anggara (2018) menekankan bahwa kebijakan yang kuat bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga harus mampu membentuk struktur operasional dan strategi jangka panjang. Hal ini belum sepenuhnya terwujud di PTKIN yang menjadi objek penelitian.

Dari enam PTKIN yang diteliti, hanya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memiliki sejarah panjang dan struktur kebijakan kelembagaan yang mengatur BIPA melalui Pusat Bahasa. Sementara PTKIN lain masih menjalankan program secara insidental, yang bergantung pada kepemimpinan dan belum memiliki perencanaan jangka panjang. Nugraha (2022) menyatakan bahwa kelemahan sistemik terjadi karena ketiadaan regulasi yang mengikat, sehingga kegiatan berjalan tanpa kesinambungan dan evaluasi kelembagaan.

Situasi ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari Lipsky (1980) tentang street-level bureaucracy, yang menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan di level bawah sering kali membuat keputusan sendiri akibat tidak adanya panduan kebijakan yang jelas. Hal ini terlihat dari penghentian program matrikulasi BIPA di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung akibat absennya dasar hukum dan dukungan dari pusat bahasa. Di sisi lain, ketidakterpaduan antara prodi TBIN dan Pusat Bahasa juga memperlemah koordinasi dan pelaksanaan program, sehingga masing-masing berjalan tanpa sinergi institusional.

Permasalahan serupa terjadi di IAIN Cirebon dan IAIN Madura. Meski secara kurikulum program BIPA sudah masuk ke dalam sistem pembelajaran, pelaksanaannya belum maksimal karena belum ada dukungan struktural yang memadai. Menurut Faryabi (2023) kesenjangan antara visi akademik dan operasional pelaksanaan program menunjukkan adanya ketidaksesuaian kebijakan. Artinya, kurikulum dan struktur kelembagaan belum sinkron, sehingga perencanaan yang disusun tidak dapat diterjemahkan secara efektif di lapangan.

Sebagian besar kendala kebijakan di PTKIN juga berkaitan dengan minimnya kesadaran institusional tentang pentingnya program BIPA sebagai

bagian dari strategi internasionalisasi pendidikan tinggi. BIPA belum dijadikan prioritas utama dalam rencana pengembangan jangka menengah universitas. Tanpa adanya visi yang kuat dari pimpinan universitas, sulit untuk mendorong koordinasi antarunit, termasuk prodi TBIN, pusat bahasa, dan biro kerja sama internasional.

Ketiadaan mekanisme evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap program BIPA berdampak pada absennya umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Evaluasi yang merupakan bagian integral dari siklus manajemen pendidikan berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan program (Stufflebeam, 2003). Tanpa evaluasi sistematis, kekeliruan dalam pelaksanaan akan terus berulang tanpa solusi konkret. Selain itu, lemahnya dukungan pendanaan turut memperparah permasalahan implementasi kebijakan. Minimnya alokasi anggaran membuat penyelenggaraan program BIPA bersifat insidental dan tidak responsif terhadap kebutuhan pembelajar asing. Di beberapa PTKIN, bahkan program berjalan dengan dana pribadi pengelola atau bersumber dari kegiatan kemahasiswaan.

Permasalahan juga muncul akibat tidak adanya kebijakan formal yang mengatur keberlangsungan program (Prastyawan dan Lestari, 2020). Di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, misalnya, program matrikulasi BIPA terhenti karena ketiadaan dasar regulatif, baik di tingkat universitas maupun di Pusat Pengembangan Bahasa. Padahal, lembaga ini seharusnya memiliki peran strategis dalam pengembangan program BIPA (Hasani dan Riansi, 2018). Sebaliknya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan praktik kelembagaan yang lebih mapan. Program BIPA telah ada sejak masa IAIN dan diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Bahasa, bukan oleh program studi, sebagaimana ditegaskan dalam wawancara berikut.

“Dari zaman IAIN program BIPA memang sudah ada, tapi dalam penyelenggaraannya tidak di prodi-prodi... Jadi diselenggarakannya oleh pusat Bahasa.” (Wawancara dengan Bu Rosida, Koordinator BIPA UIN Jakarta, 6 Juli 2023)

Pernyataan Bu Rosida menunjukkan bahwa sejak masa IAIN, program BIPA di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah berjalan, tetapi penyelenggaraannya berada di bawah Pusat Pengembangan Bahasa, bukan di program studi. Pola ini mencerminkan pengelolaan yang bersifat administratif dan terpisah dari aktivitas akademik prodi, khususnya Pendidikan Bahasa Indonesia (Lipsky, 1980). Akibatnya, program BIPA kurang terintegrasi dengan visi akademik prodi dan tidak memberi ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk terlibat dalam praktik pembelajaran .

Dari perspektif kelembagaan dan kebijakan pendidikan, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan program di lapangan. Ketidakhadiran koordinasi antara pusat pengembangan bahasa dan program studi, khususnya Tadris Bahasa Indonesia, berpotensi menimbulkan disorientasi visi kelembagaan serta menghambat institusionalisasi program BIPA secara berkelanjutan (Hasani dan Riansi, 2018). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antarlembaga agar program BIPA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendukung penguatan akademik dan profesionalisme calon pengajar.

Di sisi lain, UIN Madura, UIN Syekh Wasil Kediri, dan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menghadapi tantangan struktural meskipun program BIPA telah terintegrasi dalam kurikulum. Implementasinya belum berjalan optimal akibat absennya regulasi yang mengikat secara lintas lembaga. Di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia bahkan tidak memiliki kesempatan praktik karena kebijakan pusat pengembangan bahasa yang tidak mendukung pelibatan mereka.

Kondisi ini mencerminkan ketimpangan antara visi akademik dalam dokumen kurikulum dengan kebutuhan akan kebijakan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program. Dengan demikian, terjadi disartikulasi antara perencanaan strategis dan implementasi di lapangan, yang menjadi penghambat utama dalam institusionalisasi program BIPA di lingkungan PTKIN (Faryabi, 2023).

Problematika Pelaksanaan Program

Implementasi program BIPA di PTKIN se-Jawa Madura menunjukkan beragam tantangan. Permasalahan utama mencakup integrasi kurikulum, keterlibatan sumber daya manusia (SDM), dan keterbatasan sarana prasarana. UIN Raden Mas Said Surakarta menjadi contoh terbaik, dengan pelaksanaan program BIPA yang terstruktur melalui integrasi kurikulum, penyediaan bahan ajar berbasis budaya lokal, serta keterlibatan mahasiswa TBIN dalam praktik pembelajaran.

Berns and Erickson (2001) menjelaskan pembelajaran menjadi lebih bermakna ketika dikaitkan secara langsung dengan konteks kehidupan nyata melalui pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL). UIN Surakarta telah menerapkan CTL secara konkret melalui bahan ajar seperti “Minggu Pertama di Surakarta” yang mengintegrasikan unsur kebahasaan dan budaya lokal. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran BIPA tidak sekadar penguasaan bahasa, tetapi juga pemahaman budaya sebagai komponen penting kompetensi interkultural (Byram, 1997).



Gambar 1. Bahan Ajar Pembelajaran BIPA UIN Raden Mas Said Surakarta

Sebaliknya, PTKIN lain seperti UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, UIN Madura, dan UIN Syekh Wasil Kediri belum mencapai tahap pelaksanaan yang terstruktur. Di sejumlah perguruan tinggi, program BIPA masih terbatas pada mata kuliah peminatan dan belum terimplementasi secara menyeluruh. Keterbatasan ini disebabkan oleh minimnya jumlah mahasiswa asing, lemahnya jejaring internasional, serta rendahnya keterlibatan program studi Tadris Bahasa Indonesia (TBIN). Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kontak langsung pembelajar terhadap penggunaan bahasa dalam konteks nyata, yang sejatinya sangat penting dalam proses pemerolehan bahasa kedua. Sebagaimana dinyatakan oleh (Krashen, 1982) keterlibatan pembelajar dalam situasi autentik merupakan faktor krusial dalam keberhasilan akuisisi bahasa kedua. Selain itu, ketidakhadiran mahasiswa asing juga menghambat mahasiswa lokal memperoleh pengalaman praktik mengajar, sehingga pembelajaran BIPA tetap berlangsung secara teoritis tanpa dukungan pengalaman lapangan yang memadai.

Kasus di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menunjukkan bahwa meskipun pernah menerapkan model pembelajaran celup (*immersion learning*), pelaksanaannya terhambat oleh keterbatasan anggaran dan minimnya dukungan kelembagaan. Model celup sebagai strategi pembelajaran komunikatif berbasis interaksi langsung dengan lingkungan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi komunikatif penutur asing. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh (Richards dan Rodgers, 2001), pendekatan komunikatif memerlukan kesiapan fasilitas dan dukungan lingkungan belajar yang mendukung interaksi bermakna.

Di UIN Madura, keterbatasan mahasiswa asing menyebabkan program BIPA belum berjalan optimal, meskipun sudah dirancang dalam bentuk mata kuliah peminatan. Perlu dicatat bahwa keberadaan mahasiswa asing tidak hanya penting bagi pelaksanaan program, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan internasional terhadap institusi. Rendahnya kehadiran mahasiswa asing di PTKIN menandakan perlunya penguatan jejaring kelembagaan lintas negara sebagai bagian dari strategi internasionalisasi.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga menghadapi tantangan serupa. Program BIPA telah tersedia dalam bentuk lima mata kuliah peminatan dengan total 10 SKS. Namun, tidak ada fasilitas yang mendukung integrasi antara prodi TBIN dan Pusat Bahasa, sehingga tidak tersedia ruang praktik mengajar bagi mahasiswa. Menurut Vygotsky (1978) proses belajar bahasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan dukungan dari komunitas belajar. Ketidakterlibatan pusat bahasa menyebabkan hilangnya peluang untuk menciptakan ekosistem pembelajaran kolaboratif antara pengajar, mahasiswa, dan penutur asing.

Permasalahan lainnya adalah pada aspek SDM. Di beberapa PTKIN, pengajar program BIPA berasal dari berbagai latar belakang studi bahasa yang tidak spesifik pada pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kurangnya pelatihan dan sertifikasi BIPA menjadi penghambat pengembangan profesionalisme pengajar. Hal itu ditegaskan Shulman (1987) bahwa kompetensi mengajar mencakup tidak hanya penguasaan materi, tetapi juga pemahaman tentang strategi didaktik dan pendekatan metodologis yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajar.

Dari sisi sarana dan prasarana, sebagian besar PTKIN masih menggunakan ruang kelas konvensional yang tidak dirancang untuk pembelajaran interaktif bahasa asing. Fasilitas seperti laboratorium bahasa, perangkat audiovisual, atau media digital interaktif masih terbatas. Menurut Brown (2007) lingkungan fisik kelas sangat menentukan keberhasilan pembelajaran bahasa, karena fasilitas yang memadai dapat mendukung kegiatan simulasi komunikasi dan latihan keterampilan berbahasa secara aktif.

Kurangnya media pembelajaran kontekstual juga menjadi hambatan serius. Pengembangan bahan ajar yang terintegrasi dengan nilai-nilai lokal dan budaya Indonesia belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini mengurangi efektivitas pembelajaran, karena pembelajar asing sulit mengaitkan materi dengan pengalaman nyata mereka di Indonesia. Pembelajaran yang tidak kontekstual akan kehilangan daya tarik dan cenderung bersifat teknis semata.

Mahasiswa prodi TBIN di sebagian besar PTKIN belum memiliki pengalaman praktik langsung dalam mengajar BIPA. Padahal, pengalaman praktik ini sangat penting untuk membangun kompetensi pedagogis, empati budaya, dan strategi pengajaran adaptif. Ketidakhadiran kesempatan praktik ini melemahkan tujuan pendidikan profesional guru bahasa Indonesia untuk penutur asing.

Evaluasi pelaksanaan program BIPA pun belum menjadi perhatian utama. Banyak PTKIN tidak memiliki indikator keberhasilan yang jelas, tidak melakukan evaluasi berkala, dan tidak melibatkan alumni maupun pengguna lulusan dalam penilaian efektivitas program. Padahal, evaluasi berbasis pemangku kepentingan merupakan bagian dari manajemen berbasis mutu yang harus diterapkan secara menyeluruh.

Arah Penguatan dan Rekomendasi Pengembangan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa problematika dalam penyelenggaraan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di PTKIN se-Jawa dan Madura mencakup berbagai aspek yang bersifat sistemik, struktural, dan pedagogis. Setidaknya terdapat lima problem utama yang menjadi akar lemahnya pelaksanaan program BIPA:

1. Ketidadaan Kebijakan Institusional yang Tegas dan Tertulis

Banyak PTKIN belum memiliki kebijakan formal yang secara eksplisit mendukung penyelenggaraan program BIPA. Ketidadaan peraturan rektor, pedoman operasional, maupun visi strategis kelembagaan menyebabkan program ini berjalan sporadis, tidak berkelanjutan, dan sangat bergantung pada inisiatif pribadi dosen atau kepala unit. Hal ini bertentangan dengan prinsip tata kelola pendidikan tinggi berbasis sistem (system-based governance) yang menuntut adanya perencanaan jangka panjang, regulasi tertulis, dan keberlanjutan program.

2. Keterputusan antara Program Studi dan Lembaga Pendukung (Pusat Bahasa)

Tidak adanya sinergi antara Program Studi Tadris Bahasa Indonesia (TBIN) dan Pusat Bahasa menghambat efektivitas pelaksanaan. Pusat Bahasa

sering memonopoli pelaksanaan BIPA tanpa melibatkan mahasiswa TBIN yang sesungguhnya memiliki kapasitas pedagogis yang relevan. Fragmentasi ini menyebabkan mahasiswa TBIN kehilangan kesempatan praktik mengajar, sedangkan Pusat Bahasa kekurangan tenaga pengajar yang benar-benar terlatih dalam pengajaran bahasa kedua.

3. Ketimpangan Pelaksanaan Kurikulum

Kurikulum BIPA di masing-masing PTKIN tidak seragam. Ada yang sudah memiliki mata kuliah peminatan, namun hanya bersifat teoritis tanpa peluang praktik lapangan. Ada pula kampus yang sudah memiliki mahasiswa asing, namun belum menyediakan struktur kurikulum atau materi ajar yang memadai (Lestari et al. 2024). Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa belum ada standar nasional yang dijadikan acuan bersama, padahal keberadaan standar akan mempermudah proses akreditasi, kolaborasi antar-PTKIN, dan pengakuan internasional.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar pengajar BIPA belum tersertifikasi atau belum mengikuti pelatihan khusus tentang metodologi pengajaran BIPA. Beberapa pengajar berasal dari latar belakang bahasa asing atau sastra, bukan dari latar belakang pendidikan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ketiadaan pengembangan profesional secara berkala juga menjadi masalah serius, karena proses pembelajaran BIPA memerlukan pendekatan yang sangat kontekstual, berorientasi lintas budaya, dan adaptif terhadap perbedaan latar belakang pembelajar asing (Inderasari dan Oktavia, 2019).

5. Kurangnya Infrastruktur dan Media Pembelajaran

Sebagian besar PTKIN belum memiliki laboratorium bahasa, media audiovisual, perangkat lunak interaktif, atau bahkan modul pembelajaran BIPA yang berbasis digital dan kontekstual. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, hal ini menjadi kendala besar, karena mahasiswa asing umumnya mengandalkan media pembelajaran yang fleksibel, multimodal, dan berbasis teknologi.

Kelima problem utama di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan

program BIPA di PTKIN masih menghadapi hambatan serius yang bersifat sistemik dan saling berkaitan. Ketiadaan kebijakan institusional yang kuat menjadikan program ini tidak memiliki pijakan legal dan arah strategis yang jelas. Keterputusan antara program studi dan lembaga pendukung menyebabkan terhambatnya integrasi akademik dan praktik pedagogis yang ideal. Ketimpangan kurikulum menunjukkan belum adanya standar nasional yang dapat menjadi acuan pengembangan bersama, sedangkan lemahnya kapasitas SDM dan minimnya infrastruktur semakin memperparah kondisi tersebut. Jika persoalan-persoalan ini tidak segera diatasi secara menyeluruh dan terkoordinasi, potensi besar program BIPA sebagai alat diplomasi budaya dan internasionalisasi pendidikan tinggi berbasis Islam akan sulit diwujudkan secara optimal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program BIPA di lingkungan PTKIN masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan, seperti ketiadaan regulasi formal, minimnya dukungan dana, serta kurangnya keterlibatan program studi Tadris Bahasa Indonesia. Program ini umumnya belum terintegrasi secara optimal dalam sistem akademik dan cenderung berjalan secara parsial. Akibatnya, program BIPA belum mampu memberikan kontribusi maksimal dalam membentuk lulusan yang siap menjadi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Selain itu, mahasiswa TBIN juga kehilangan kesempatan berharga untuk mengaplikasikan teori pedagogik secara langsung dalam situasi pembelajaran yang nyata dan lintas budaya.

Kesenjangan antara perencanaan dan implementasi semakin diperparah oleh terbatasnya kontak pembelajar dengan konteks bahasa nyata, yang sejatinya sangat penting dalam proses akuisisi bahasa kedua. Situasi ini berdampak pada rendahnya efektivitas pembelajaran karena pembelajar asing tidak mendapatkan cukup pengalaman linguistik yang otentik. Padahal, pendekatan komunikatif dan berbasis pengalaman nyata menjadi prinsip utama dalam pembelajaran bahasa kedua yang efektif. Untuk menjamin

keberlanjutan dan efektivitas program, diperlukan sinergi kelembagaan antara pusat pengembangan bahasa dan program studi, serta dukungan kebijakan yang lebih sistematis dalam mendorong internasionalisasi pendidikan tinggi keagamaan melalui program BIPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, A. 2022. "Strategi Pengembangan Program BIPA Di Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 10(2):115–30.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Cetakan ke. Bandung: Pustaka Setia.
- Berns, R. G., and P. A. Erickson. 2001. *Contextual Teaching and Learning: Preparing Students for the New Economy*. Washington: National Dissemination Center for Career and Technical Education.
- Brown, H. D. 2007. *Principles of Language Learning and Teaching*. 5th Ed. New York: Longman.
- Byram, M. 1997. *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
- Faryabi, Aminuddin. 2023. "Manajemen Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) Berdasar Keputusan Dirjen Pendis No. 6244 Tahun 2019 Pada UIN Raden Mas Said Surakarta Dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." 5(6244):1–14.
- Hasani, Aceng, and Erwin Salpa Riansi. 2018. "Upaya Memartabatkan Bahasa Indonesia Melalui Peningkatan Mutu Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya." *Jurnal Membaca Bahasa Dan Sastra Indonesia* 3(1):85–90. doi: <http://dx.doi.org/10.30870/jmbasi.v3i1.3748>.
- Inderasari, Elen, and Wahyu Oktavia. 2019. "Implementasi Kurikulum BIPA (Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing) Berbasis Cultural Islamic Studies (Intergrated Curriculum) Di Perguruan Tinggi Islam." *Jurnal Bahasa Lingua Scientia* 11(1):127–44.
- Isnaniah, Siti. 2020. "Management of Indonesian Language Learning for Foreign Speakers (BIPA) at Islamic Religious Higher Education Institutions (PTKI) in Indonesia and Thailand." *Jurnal Pendidikan Islam* 9(1):1–28. doi: <https://doi.org/10.14421/jpi.2020.91.1-27>.
- Jazeri, Mohamad, and Siti Zumrotul Maulida. 2018. "Hambatan Dan Harapan Pemartabatan Bahasa Indonesia." *Indonesian Language Education and Literature* 4(1):52–61. doi: <http://dx.doi.org/10.24235/ileal.v4i1.2493>.
- Krashen, SD. 1982. *Prinsip Dan Praktik Dalam Pemerolehan Bahasa Kedua*.

Oxford: Pergamon Press.

- Lestari, Citra Rizky, Zulfa Fahmy, Maulida Laily Kusuma Wati, Wagiran, and Subyantoro. 2024. "Tinjauan Holistik Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing Di UIN Walisongo." *Pendekatan Inovatif Dengan Model CIPP* 12(1):179–92. doi: <https://doi.org/10.25299/geram.2024.17232>.
- Lipsky, Michael. 1980. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2018. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 4th ed. Kanada: University of British Columbia.
- Muyassaroh, Siti Zumrotul Maulinda, Aldila Rahmita Putri, and Dita Karisma Fahriani. 2024. "Pemartabatan Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Se-Jawa Dan Madura." *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 6(1):1–20. doi: 10.19105/ghancaran.v6i1.11224.
- Nugraha, Dipa. 2022. "Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA): Masalah Kefasihan, Kebakuan, Rujukan Belajar, Dan Kesusastaan." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 7(2):243. doi: 10.30998/sap.v7i2.13788.
- Nursalim, M. 2020. "Evaluasi Sarana Prasarana Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing (BIPA)." *Jurnal Al-Ta'lim* 27(1):55–66.
- Patton, M. Q. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Prastyawan, Agus, and Yuni Lestari. 2020. *Pengambilan Keputusan*. Surabaya: Unesa University Press.
- Purnamasari, A. 2021. "Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia Bagi Penuur Asing (BIPA) Dalam Perspektif Psikolinguistik." Pp. 458–63 in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Sosial Humaniora (SNS)*.
- Richards, J., and T. Rodgers. 2001. *Pendekatan Dan Metode Dalam Pengajaran Bahasa*. New York: Cambridge University Press.
- Rochmawati, I., and S. Muslim. 2019. "Kebijakan Institusi Dalam Pengembangan Program BIPA Di PTKIN." *Jurnal Bahasa Dan Sastra*

7(1):30–42.

Shulman, L. S. 1987. “Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform.” *Harvard Educational Review* 57(1).

Stufflebeam, D. .. 2003. “The CIPP Model for Evaluation.” in *Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network*.

Vygotsky, L. S. 1978. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Yin, K. 2018. *Case Study Research and Applications*. SAGE Publications, Inc.

Yusuf, M., and H. Arifin. 2023. “Problematika Pengajaran BIPA Di PTKIN: Sebuah Kajian Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 11(2):144–59.